

Sumedang, 15 April 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RPJMN Tahun 2025-2029

*Musrenbang RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dan
Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029*

Direktorat Regional I
Kedeputan Bidang Pembangunan Kewilayahan
Kementerian PPN/Bappenas





1

Visi Indonesia Emas 2045 dan Strategi Transformasi

2

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029

3

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada Rancangan Awal RKP Tahun 2026

01

Visi Indonesia Emas 2045 dan Strategi Transformasi

Tantangan Pembangunan Global dan Domestik

Kondisi Global Semakin Kompleks



Perubahan Iklim

Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.



Dunia semakin proteksionis.

Meningkatnya proteksionisme mendorong ketidakpastian terhadap perdagangan global.



Disrupsi Teknologi

Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini.



Eskalasi Geopolitik dan Geoekonomi

Memunculkan fragmentasi dan kekuatan baru.



Demografi Global

Penduduk dunia menjadi 9,7 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%) pada Tahun 2050.

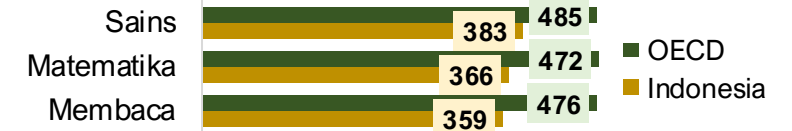
Sumber : United Nations (2024)

Tantangan Pembangunan Indonesia

PENDIDIKAN

Sumber : OECD (2023), PISA 2022 Result (Volume 1)

Skor PISA
masih rendah,
(Data 2022)



SDM

Sumber : World Bank Database (2025)

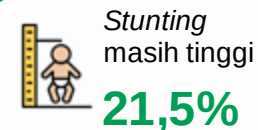
Kualitas SDM
Indonesia masih
relatif rendah

Indeks Modal Manusia, Tahun 2020



KESEHATAN

Sumber : SKI (Survei Kesehatan Indonesia) tahun 2023,
LF SP (Long Form Sensus Penduduk) 2020



EKONOMI



Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan selama 20 tahun terakhir.

Visi dan Misi RPJPN 2025-2045

Visi

Visi Indonesia 2045:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia



Bersatu

Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika



Berdaulat

Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, Tangguh



Maju

Berdaya, Modern, Tangguh, Unggul, Inovatif, Adil



Berkelanjutan

Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan

Sasaran Visi



Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah



Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Agustus - 2024

Nasional	4,91
Sumatera	4,75
Jawa	5,35
Bali - Nusa Tenggara	2,51
Kalimantan	4,42
Sulawesi	3,65
Maluku dan Papua	4,42



Tingkat Kemiskinan (%) September - 2024

Nasional	8,57
Sumatera	7,74
Jawa	7,00
Bali - Nusa Tenggara	11,58
Kalimantan	5,51
Sulawesi	9,47
Maluku dan Papua	20,43



Rasio Gini (Indeks) September - 2024

Nasional	0.308 - 0.402
Sumatera	0.254 - 0.337
Jawa	0.315 - 0.407
Bali - Nusa Tenggara	0.304 - 0.341
Kalimantan	0.269 - 0.310
Sulawesi	0.328 - 0.373
Maluku & Papua	0.293 - 0.371



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024

Nasional	75,02
Sumatera	73,13 - 79,89
Jawa	73,87 - 84,15
Bali - Nusa Tenggara	69,14 - 78,63
Kalimantan	71,19 - 78,79
Sulawesi	70,46 - 75,68
Maluku & Papua	54,43 - 73,83

Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Per-Wilayah Tahun 2024

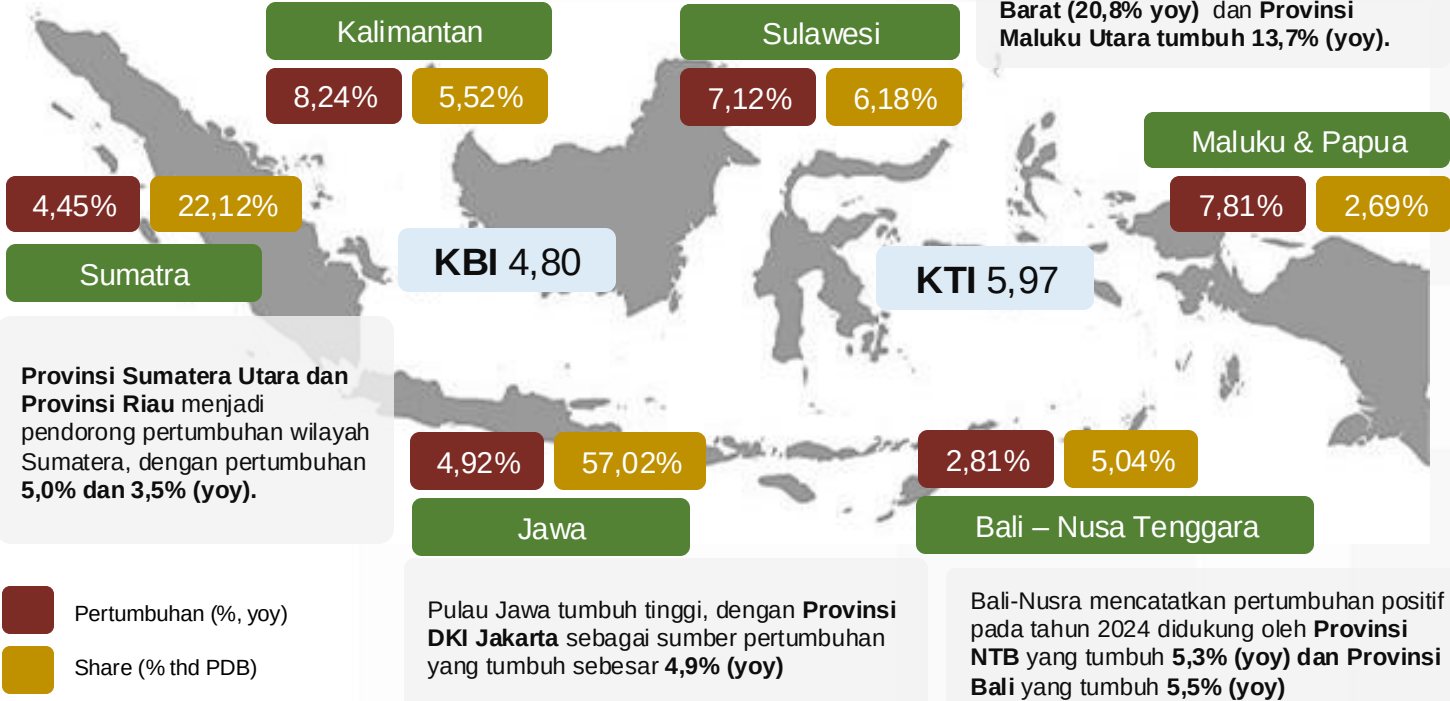
Share Ekonomi terhadap PDB (%)

	2014	2024
KBI	80,41%	79,14%
KTI	19,60%	20,85%

Provinsi dengan kontribusi paling tinggi di Wilayah Kalimantan adalah **Provinsi Kalimantan Timur**, tumbuh sebesar **6,2% (yoy)**

Pertumbuhan wilayah Sulawesi didorong oleh pertumbuhan tinggi **Provinsi Sulawesi Tengah (9,9% yoy)**

Pertumbuhan wilayah Maluku dan Papua didorong oleh dua sumber pertumbuhan, yaitu: **Provinsi Papua Barat (20,8% yoy)** dan **Provinsi Maluku Utara tumbuh 13,7% (yoy)**.



Kondisi Fiskal dan Kapasitas Keuangan Daerah

Kemandirian fiskal daerah relatif masih rendah



83%

Rata-rata Proporsi Pendapatan Transfer (TKD) terhadap total Pendapatan Daerah (2020-2024)

16%

Rata-rata Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah (2020-2024)

Belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin

68%

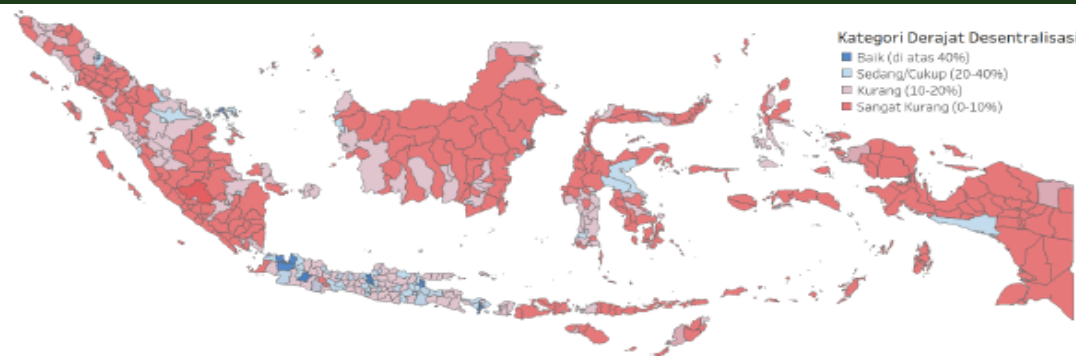
Rata-rata Proporsi Belanja Operasional terhadap total Belanja Daerah (2020-2024)

Belanja pegawai menjadi komponen belanja operasional terbesar (36%)



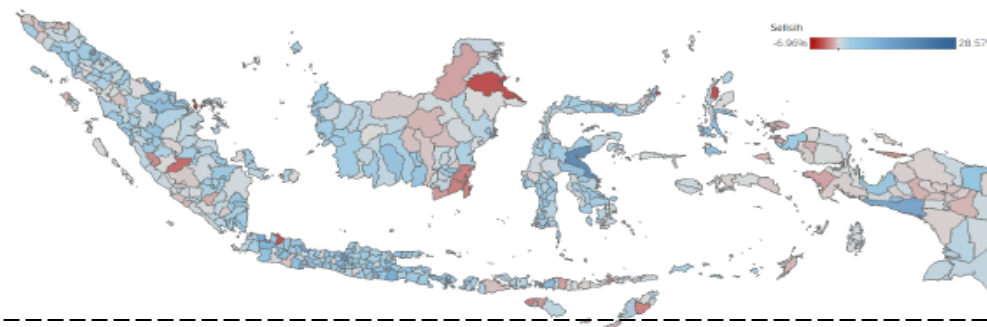
Sumber : Bappenas (2025) *Data terlalu lama yang bukan outlier digunakan jika data tahun 2015 tidak tersedia di pemerintahan daerah tersebut.

Derajat Desentralisasi 2023



Wilayah dengan warna biru menandakan derajat desentralisasi di atas 40% yang mencerminkan tingkat desentralisasi yang **baik dan dominan di wilayah Jawa-Bali**.

Selisih Derajat Desentralisasi (2015-2023)



Wilayah berwarna merah muda hingga merah menunjukkan **penurunan derajat desentralisasi**, menandakan meningkatnya ketergantungan pada transfer pusat dibandingkan tahun 2015 dan terjadi di 16,6% kabupaten/kota yang didominasi di luar Jawa. **Referensi PPN/Bappenas**

Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah

A EFISIENSI BELANJA “Belanja produktif daerah sejalan dengan fokus prioritas di dalam RPJMN 2025-2029”

B



Pengembangan Inovasi Pendanaan Daerah

1

Optimalisasi dan Perluasan Sumber Pendanaan

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan daerah yang tersedia, antara lain

- (a) Penerusan Pinjaman Pemerintah Pusat ke Daerah;
- (b) Insentif kepada Badan Usaha dan Masyarakat

2

Pengembangan Skema Pendanaan Inovatif

- Pengembangan *delivery mechanism* pembiayaan proyek yang melibatkan lembaga pembiayaan, badan usaha, Kementerian/Lembaga/Daerah, dan/atau mitra pembangunan luar negeri.
- Pengembangan model-model kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU).
- Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

3

Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pembangunan

- Lembaga pembiayaan pembangunan daerah;
- Lembaga fasilitasi pembiayaan inovatif (project developer).

4

Efisiensi Belanja di Daerah dan Mendorong Belanja Produktif Daerah

Belanja daerah diarahkan sejalan dengan fokus prioritas di dalam RPJMN 2025-2029,

C

Sinergi dan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan



KAWASAN LUMBUNG PANGAN

APBN

- Bendungan dan Jaringan Irigasi
- Jalan menuju kawasan
- Sarana Pasca Panen Pertanian
- Pendampingan dan Pelatihan Petani
- Subsidi Pupuk
- Sertifikasi Benih
- Dukungan Akses Pembiayaan Pertanian

APBD

- Jalan dan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Pertanian
- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
- Bantuan Alsintan
- Pelatihan Peningkatan SDM
- Fasilitasi dan Pengawasan Pertanian

SUMBER LAIN

(BUMN/Swasta, CSR, Swadaya Masyarakat)

- KUR Pertanian
- Pengolahan Lahan
- SDM Pertanian
- Penyediaan Benih
- Sarpras Pertanian

02

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029

VISI RPJMN 2025-2029



Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh **17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins), dan 320 Program Kerja.**

- ❑ **Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu:**

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

- ❑ Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi yang kuat, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

PROYEKSI TARGET SASARAN PADA RPJMN 2025-2029



Arah Pembangunan

8 Prioritas Nasional
Asta Cita

Visi Misi Presiden

RPJPN 2025-2045

Direncanakan dan Dianggarkan



Strategi Kewilayahan

Menyatukan arah
pembangunan nasional
(pusat dan daerah)



Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan

Memperkuat Pengendalian
Pembangunan



Sasaran Utama Pembangunan Tahun 2029

Ket: a) 2023; b) 2022; c) Sept 2024; d) 2020

2024

Target 2029



Pendapatan per Kapita menuju Negara Maju,
Pertumbuhan Ekonomi menuju 8%

GNI per kapita
Kontribusi PDB Maritim
Kontribusi PDB Manufaktur

USD4.810^{a)}

7,9^{b)}

19,0%

USD8.000

9,1 %

21,9%



Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan
Berkurang

Tingkat Kemiskinan
Rasio Gini
Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia

8,57^{c)}

0,373^{c)}

20,9

4,5-5,0%

0,372-0,375

22,4%



Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia
Internasional Meningkat

Global Power Index (peringkat)

34^{a)}

29



Daya Saing SDM Meningkat

Indeks Modal Manusia (IMM)

0,54^{d)}

0.59



Intensitas emisi GRK menurun menuju *net
zero emission*

Penurunan Intensitas Emisi GRK
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

34,09^{b)}

72,54^{a)}

45,17%

77,20

RPJMN Tahun 2025-2029 dan Sasaran Utama Pembangunan

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029



RPJMN 2025 – 2029 akan dilampirkan:

1 Indikator Kinerja
Pembangunan
di tiap K/L

2 Intervensi
Pembangunan
di tiap daerah

Visi Misi
Presiden

Arah
Pembangunan

8 Prioritas Nasional
17 Program Kerja
8 Quick Wins
83 Kegiatan Prioritas
Utama

RPJPN
2025–
2045

Direncanakan dan
dianggarkan

Strategi
Kewilayahan



Menyatukan arah
pembangunan nasional
(pusat dan daerah)

Tata Kelola Pelaksanaan
Pembangunan



Memperkuat Pengendalian
Pembangunan



1 Pendapatan per Kapita
setara Negara Maju

**Pertumbuhan Ekonomi
menuju 8%**

- ✓ GNI per kapita menjadi **8.000 USD**
- ✓ Kontribusi PDB Maritim menjadi **9,1 %**
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur menjadi **21,9%**



2 Kemiskinan Menurun dan
Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan menjadi **4,5-5,0%** serta tingkat kemiskinan ekstrem menjadi **<0,5%*** (di tahun kedua)
- ✓ Rasio gini turun menjadi **0,372-0,375**
- ✓ Kontribusi PDRB KTI menjadi **22,4%**



3 Kepemimpinan dan Pengaruh
di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ *Global Power Index* menjadi **peringkat 29**



4 Daya Saing Sumber Daya
Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi **0,59**



5 Intensitas emisi GRK
menurun menuju
net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK menjadi **45,17%**
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi **77,20**

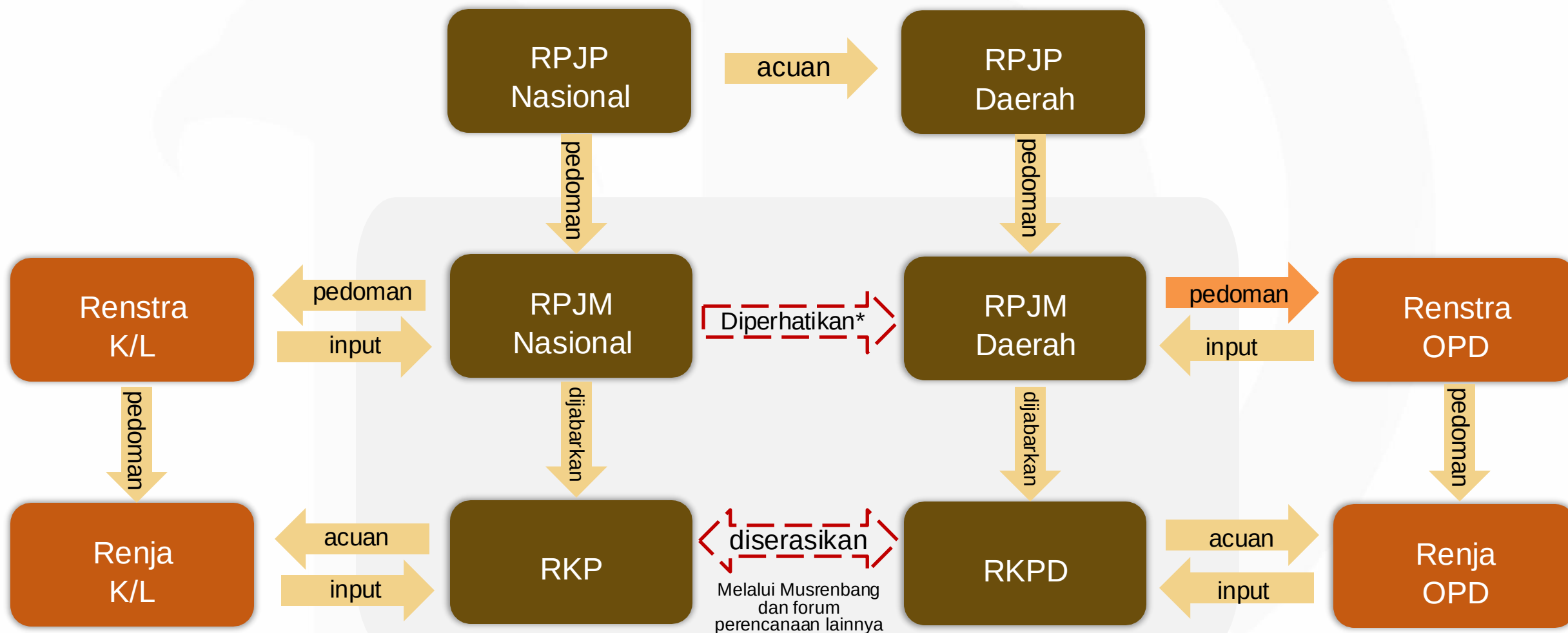


Sasaran Utama
Pembangunan
Tahun 2029

03

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada Rancangan Awal RKP Tahun 2026

KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



*) Catatan: dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditekankan bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN; UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025 – 2045; Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 - 2029

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP TAHUN 2026

Visi RPJPN 2025-2045 "NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"

Visi RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Tema RKP 2026 "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" (Tentatif)

Pangan dan Energi

Swasembada Pangan, Energi, dan Air

- Optimalisasi BULOG
- Pelaksanaan *food estate**
- Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel
- Energi terbarukan
- Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir*

PN 2

Ekonomi

Produktif

Pendidikan dan Kesehatan

- Ekosistem Makan Bergizi Gratis*
- Percepatan renovasi sekolah*
- Sekolah unggulan*
- Cek kesehatan*
- Percepatan rumah sakit daerah*

Deregulasi dan kepastian hukum

- Reformasi Birokrasi
- Kemudahan berbisnis
- Ketertarikan investasi

Adopsi Teknologi dan Inovasi

- Transformasi digital
- Riset dan Inovasi

Pertahanan Semesta

- Komponen cadangan
- Pemenuhan alutsista
- Penguatan kemampuan teritorial

Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi

PN 1, 4, 7, dan 8

Inklusif

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

- Percepatan Hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia*
- Optimalisasi potensi SWF Danantara

Percepatan Pengentasan Kemiskinan

- Data tunggal kemiskinan
- Digitalisasi bantuan
- 3 juta rumah*
- 70.000 koperasi merah putih

PN 3, 5, dan 6

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tema RKP 2026

“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” (Tentatif)

Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2026



Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

	2024	2025	2026
 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,3	6,3
 GNI per Capita	5.000	5.410	5.870
 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09	35,53	37,14
 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023)	76,49	76,67

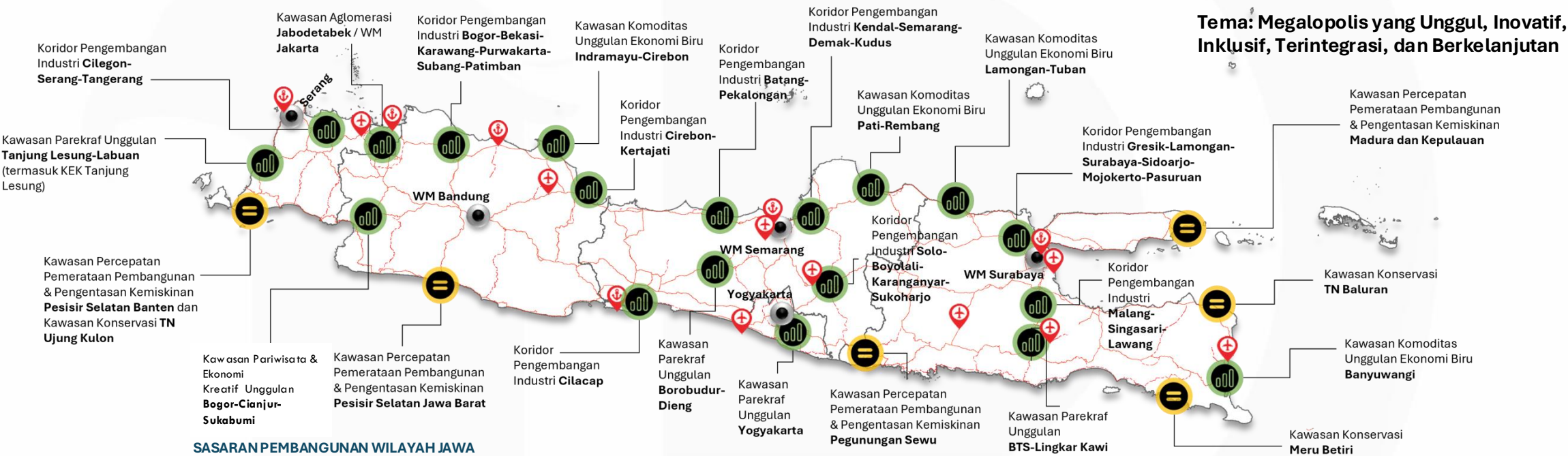
Penurunan Kemiskinan

 Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	7,0 - 8,0	6,5 – 7,5
 Kemiskinan Ekstrem (%)	0,83	0	0
 Rasio Gini	0,373	0,379-0,382	0,377- 0,380

Sumber Daya Manusia Berkualitas

 Indeks Modal Manusia	0,54	0,56	0,57
---	------	------	-------------

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN PULAU JAWA



SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA

	RATA-RATA LPE	KONTRIBUSI PDRB	PDRB PER KAPITA	TPT	KEMISKINAN
2025	6,9	56,5	85,4	5,12 – 5,65	6,68 – 7,68
2029		55,1	122,4	4,54 – 5,30	3,79 – 4,79

Ket : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

LEGENDA			
	Klaster Pertumbuhan		Bandar Udara
	Klaster Pemerataan		Pelabuhan
	Ibu Kota Provinsi		Jalan Rencana (Tol & Non-Tol)
			Batas Administrasi
			Jalan Nasional

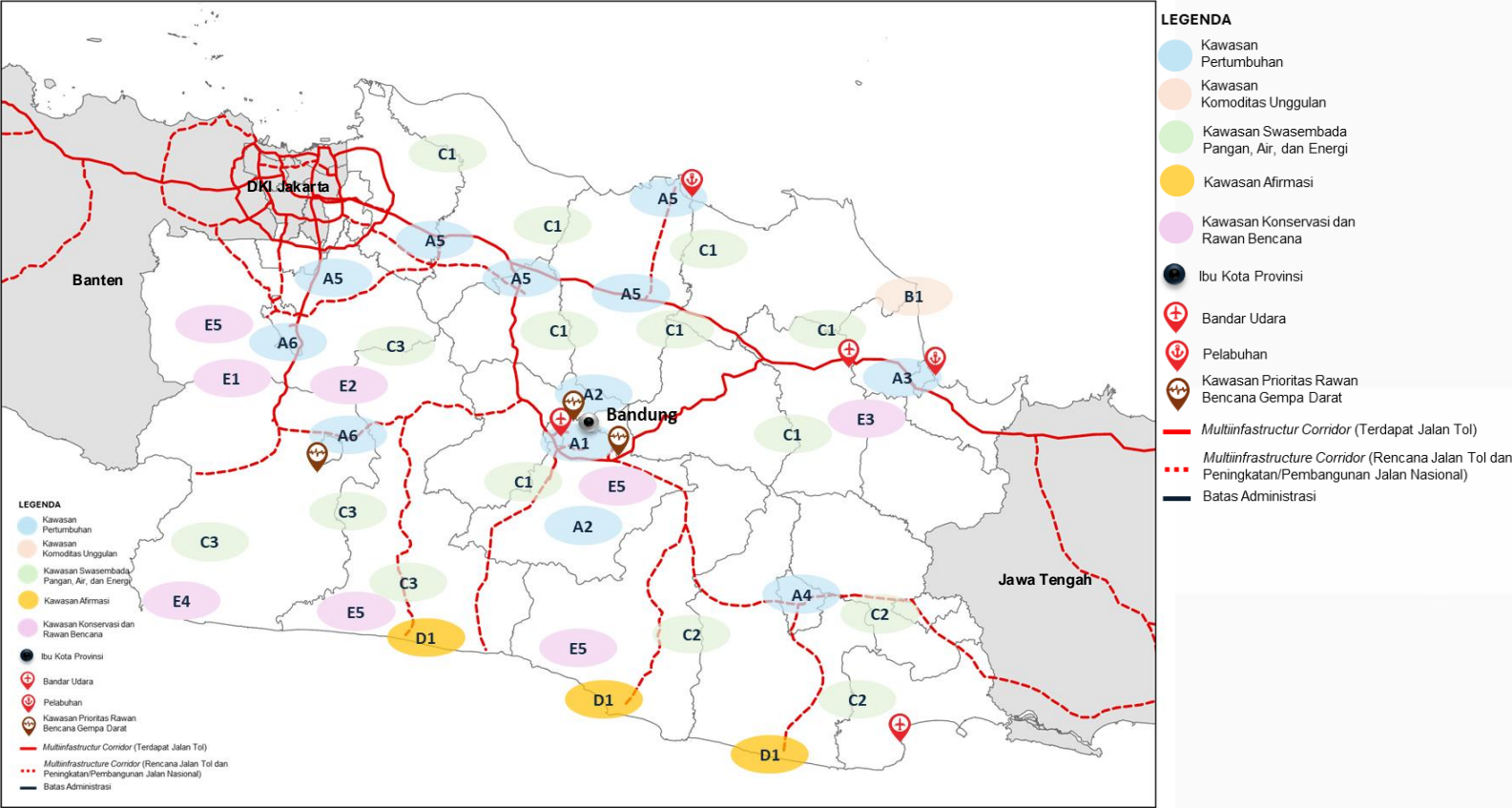
Sasaran Pembangunan Provdi Wilayah Jawa		DKI Jakarta	Jawa Barat	D.I Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur	Banten
%Rata-rata LPE	2025						
	2029	6,8	6,9	7,0	6,7	6,9	6,8
Kemiskinan	2025	3,55 – 3,85	5,85 – 6,46	10,00 – 10,50	9,00 – 9,66	7,58 – 8,08	4,50 – 5,50
	2029	2,08 – 3,08	2,86 – 3,86	6,11 – 7,11	5,21 – 6,21	4,31 – 5,31	2,42 – 3,42
IMM	2025	0,65	0,57	0,75	0,62	0,64	0,56
	2029	0,689	0,599	0,789	0,654	0,681	0,589

Sinergi dan Dukungan Daerah

- Dukungan **penyediaan lahan** pada lokasi yang akan diintervensi.
- Penyiapan **dukungan masyarakat** untuk meminimalisir dampak sosial.
- Penyiapan **RTRW/RDTR serta kelengkapan dokumen lainnya**.
- Percepatan **perizinan** yang menjadi kewenangan Pemda.
- Optimalisasi **penganggaran** (termasuk dana desa).
- Penyiapan **SDM yang sesuai** dengan kebutuhan.
- Penataan **kawasan permukiman/perkotaan** di kawasan pertumbuhan.
- Bagi daerah dengan aset & kapasitas fiskal yang relatif tinggi/memadai, dapat melakukan **pembiayaan kreatif**.

ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025 	6,9 (Rata-rata LPE 2025-2029)	59,6	12,7	5,85 – 6,46	0,383 – 0,390	0,57	6,61	64,06	6,42 – 6,99
2029	7,9 (2029)	84,9	12,3	2,86 – 3,86	0,381 – 0,383	0,60	8,95	65,07	5,94 – 6,56



A. Kawasan Pertumbuhan

- WM Bandung, Kawasan Pengembangan Industri **Cekungan Bandung**
- Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya
- Kawasan Perkotaan Cirebon & Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati
- Kawasan Perkotaan Tasikmalaya
- Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)
- Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur

B. Kawasan Komoditas Unggulan

- Indramayu-Cirebon (Ekonomi Biru)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

- Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Indramayu, **Kab. Sumedang**, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan)
- Citanduy-Ciwulan-Cilaki (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran)
- Priangan Barat (Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi)

D. Kawasan Afirmasi

- Jawa Barat Bagian Selatan (bagian pesisir selatan Kab. Cianjur, Kab. Garut, dan Kab. Tasikmalaya) (Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

- TN Halimun-Salak
- TN Gede-Pangrango
- TN Ceremai
- Geopark Ciletuh
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat (Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cianjur)

Terima Kasih

Direktorat Regional I
Kedeputan Bidang Pembangunan Kewilayahan
Kementerian PPN/Bappenas